



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN DANA PENYERTAAN MODAL KEMITRAAN USAHA BUDIDAYA TEBU

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung swasembada gula Nasional, meningkatkan pendapatan petani dan mengembangkan perekonomian pedesaan, perlu digerakkan usaha tani tebu secara intensif dengan penyediaan modal yang cukup;
 - b. bahwa sehubungan keterbatasan kemampuan permodalan petani untuk melaksanakan budidaya tebu, maka Pemerintah Kabupaten Pemalang perlu memberikan fasilitasi permodalan melalui sistem kemitraan secara berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Penyertaan Modal Kemitraan Usaha Budidaya Tebu.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk / Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DANA PENYERTAAN MODAL KEMITRAAN USAHA BUDIDAYA TEBU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang;
2. Bupati adalah Bupati Pemalang;
3. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang;
4. Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pemalang;
5. Wilayah pengembangan kemitraan usaha budidaya tebu adalah suatu kawasan yang potensial untuk pengembangan kemitraan usaha budidaya tebu dalam satu Kabupaten;
6. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pemalang;
7. Kemitraan usaha budidaya tebu adalah suatu usaha di bidang perkebunan yang menghasilkan produksi kristal gula;
8. Pelaksana kegiatan pengembangan kemitraan usaha budidaya tebu adalah pelaksana kegiatan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan;
9. Koperasi Petani Tebu Rakyat yang selanjutnya disingkat KPTR adalah Koperasi Petani Tebu Rakyat “Raksa Jaya” dan “Tani Mulyo” Kabupaten Pemalang;
10. Dana Penyertaan Modal Kemitraan Usaha Budidaya Tebu adalah dana yang dipinjamkan kepada petani yang berusaha di bidang budidaya tebu melalui KPTR yang selanjutnya dana tersebut akan dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Pemalang pada saat yang telah ditentukan.

BAB II

POLA PENGELOLAAN DANA PENYERTAAN MODAL KEMITRAAN USAHA BUDIDAYA TEBU

Pasal 2

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan kemitraan usaha budidaya tebu dan meningkatkan pendapatan petani tebu serta menumbuhkan perekonomian di pedesaan Pemerintah Kabupaten memberikan pinjaman berupa dana penyertaan modal kemitraan usaha budidaya tebu kepada petani yang berusaha di bidang budidaya tebu.

Pasal 3

Pinjaman berupa dana penyertaan modal kemitraan usaha budidaya tebu diterima petani melalui KPTR untuk mengembangkan usaha budidaya tebu dan selanjutnya sistem pengembalian dan besarnya jasa diatur dalam MoU antara Dinas Pertanian dan Kehutanan dengan KPTR atas nama petani tebu dan Pabrik Gula.

Pasal 4

Petani calon penerima pinjaman dana penyertaan modal kemitraan usaha budidaya tebu diadakan seleksi oleh KPTR dengan diketahui Pabrik Gula dan Dinas Pertanian dan Kehutanan.

BAB III

BENTUK KEMITRAAN USAHA BUDIDAYA TEBU

Pasal 5

Pengelolaan dana penyertaan modal kemitraan usaha budidaya tebu dalam bentuk paket meliputi : pengolahan tanah, penyediaan pupuk, obat-obatan, kletek dan tebang angkut.

BAB IV

PENGELOLAAN PENGEMBANGAN USAHA BUDIDAYA TEBU

Pasal 6

Petani calon penerima pinjaman dana penyertaan modal kemitraan usaha budidaya tebu dalam pengelolaan usahanya didasarkan pada Surat Pengajuan dari Kelompok Tani yang diketahui oleh KPTR dan Pelaksana Kegiatan.

Pasal 7

Perjanjian Kerja Sama untuk Pengelolaan Dana Penyertaan Modal Kemitraan Usaha Budidaya Tebu dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan dengan KPTR dan Pabrik Gula.

BAB V

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 8

Mekanisme pencairan dan penyaluran dana penyertaan modal kemitraan usaha budidaya tebu adalah sebagai berikut :

- a. Pengajuan daftar nominatif petani peserta kegiatan oleh ketua kelompok tani yang diketahui oleh Ketua KPTR ke Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan;
- b. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) lewat Bendahara Pengeluaran Kegiatan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- c. Pencairan dana dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten langsung pada rekening KPTR “ Raksa Jaya “ dan “ Tani Mulyo “.

Pasal 9

Mekanisme penarikan dana penyertaan modal kemitraan usaha budidaya tebu adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan melalui Pejabat Pelaksana Kegiatan mengajukan permintaan penarikan dana penyertaan modal kemitraan usaha budidaya tebu pada setiap akhir musim giling kepada KPTR;
- b. KPTR bersama Pabrik Gula membuat Perhitungan Bagi Hasil Efektif (PBHE);
- c. KPTR menarik dana dari pembayaran bagi hasil petani sebesar pokok pinjaman ditambah jasa 8 % dengan rincian sebagai berikut :
 - 6 % disetor ke Kas Daerah Kabupaten beserta pokok modal;
 - 2 % biaya operasional koperasi dan teknis;

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan bertanggung jawab secara teknis terhadap pelaksanaan kegiatan dana penyertaan modal kemitraan usaha budidaya tebu;

- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan fungsi pembinaan, pengawasan penggunaan dana penyertaan modal kemitraan usaha budidaya tebu Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan membentuk Pelaksana Kegiatan Kemitraan Usaha Budidaya Tebu.

Pasal 11

Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan melalui Pelaksana Kegiatan Kemitraan Usaha Budidaya Tebu berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan budidaya tebu serta penggunaan dana penyertaan modal kemitraan usaha budidaya tebu.

Pasal 12

Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan berkewajiban melaporkan perkembangan penggunaan dana pinjaman dan perkembangan budidaya tebu secara berkala kepada Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Penyertaan Modal Kemitraan Budidaya Tebu (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 8 Maret 2010

BUPATI PEMALANG,

Cap.

ttd

H. M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang

pada tanggal 8 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Cap.

ttd

SUMADI SUGONDO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2010 NOMOR 10